PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

2020

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TRIBULAN I

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

Tugas Pokok dan Fungsi DISNAKER

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016

Tugas

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Fungsi

1. Penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DINAS TENAGA KERJA

A. VISI dan MISI Kab. Lamongan

Perda Kab. Lamongan 14 Tahun 2017

VISI

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

DISNAKER

Misi Kabupaten Lamongan

01	02	03	04	05
Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

VISI
TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL	MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA	Persentase Penduduk yang Bekerja	Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
			Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
				Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
			Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)

PROSES BISNIS DISNAKER

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN
- KEPATUHAN INTERNAL
- KEPATUHAN RESIKO

PROSES BISNIS INTI

- Meningkatnya Penempatan Kerja
- Meningkatnya Perlindungan Pekerja
- Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

PROSES BISNIS PENDUKUNG

- Perundang Undangan yang Berlaku
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Peraturan
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi Informasi
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup

TUJUAN

Meningkatnya Penduduk yang Bekerja

HASIL/ OUTPUT
Penduduk yang Bekerja

MANFAAT/ BENEFIT
MENURUNNYA TPT

Pengelolaan Resiko

Resiko : Menurunnya Penduduk yang bekerja
Penyebab : Menurunnya Kompetensi Calon Tenaga Kerja
Dampak : Menurunnya Kesempatan Kerja
Pengendalian : Pelatihan untuk Calon Tenaga Kerja, Pemagangan dan Bursa Kerja/Job Fair
Rencana pengendalian lanjutan : Peningkatan BLK, peningkatan Pemagangan dan Peningkatan Bursa Kerja/Job Fair

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja dan Anggaran :
Menyelaraskan visi dan misi sesuai dengan Renstra.
Dalam Pengelolaan
Kinerja DISNAKER selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :
Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai
Tupoksi dan SOP yang berlaku

Pengelolaan Resiko :
Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul

PENGELOLAAN KINERJA

VISI " TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING "

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DISNAKER	INDIKATOR	SASARAN DISNAKER	INDIKATOR	PROGRAM DISNAKER	INDIKATOR PROGRAM
5.Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	1.Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai2 agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya Penduduk Yang Bekerja	Meningkatnya Penduduk Yang Bekerja	% Penduduk yang bekerja	1. Meningkatnya Penempatan Kerja	% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 3. Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Transmigrasi Regional	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Sektor Formal Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Terdistribusikan % Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya
					2. Meningkatnya Perlindungan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan % Penyelesaian Perselisihan Kerja	**5**. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Tripartit
					3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)		

KEPATUHAN INTERNAL

SOP PENERBITAN AK-1 TAHUN 2020

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pencaker	Petugas	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pencari Kerja mendatangi tempat pelayanan, mengambil dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan pendaftaran					1. Surat Keterangan dari Desa 2. FC. Ijazah Terakhir 3. FC. KTP. 4. Pas Foto 2X3 3 lembar 5. Formulir Ak.I	10 menit	Formulir persyaratn telah diisi dan dilengkapi	SOP Pembuatan Kartu AK.I
2.	Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dan kevalidan data					1. Surat Keterangan dari Desa 2. FC. Ijazah Terakhir 3. FC. KTP. 4. Pas Foto 2X3 3 lembar 5. Formulir Ak.I	5 menit	Keabsahan dan kebenaran data	
3.	Jika data dan persyaratan sudah lengkap, dilanjutkan proses input data, jika belum maka akan dikembalikan ke pencaker untuk dilengkapi						10 menit	Keabsahan dan kebenaran data	
4.	Petugas melakukan input data ke aplikasi					Formulir Ak.I	5 menit	Keabsahan dan kebenaran data	
5	Petugas mencetak kartu AK.I dan menyediakan ke Kasi					Print out Kartu Putih / AK.I	5 menit	Print out Kartu Putih / AK.I	
6	Kepala Seksi melakukan penandatanganan AK.I					Print out Kartu Putih / AK.I	5 menit	Kartu Putih AK.I telah ditanda tangani dan diserahkan ke petugas	

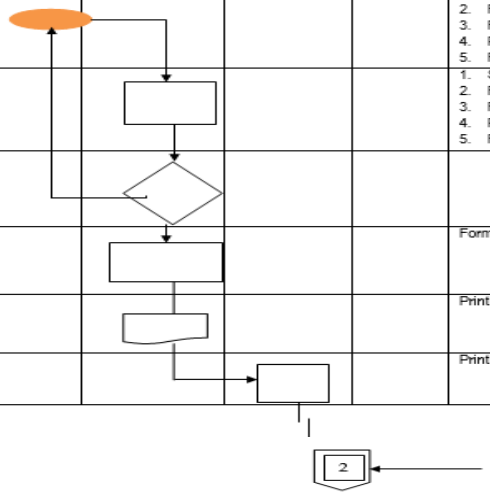

7	Petugas menerima kartu AK.I yang sudah ditanda tangani lalu diserahkan ke pencaker yang bersangkutan					Kartu Putih / AK.I	5 menit	Kartu putih AK.I disetempel dan diberi tanggal, lalu diserahkan ke pencaker	
8	Pencari Kerja menerima kartu putih / AK. I					Kartu Putih / AK.I	2 menit	Kartu putih AK.I disetempel dan diberi tanggal, lalu diserahkan ke pencaker	

SOP PENDAFTARAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2020

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		KABID	KASI	PENGADMINISTRASIAN/STAF	PEMOHON/ PENDAFTAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Calon Peserta Pelatihan Kerja datang ke tempat pelayanan dan mengisi formulir pendaftaran				MULAI	1. formulir 2. Fc. KTP 3. Fc. Ijazah Terakhir 4. Pas Foto 4X6 sebanyak 2 Lb.	1-10 Menit		
2	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengentri data ke komputer serta mencetak data tersebut untuk disedikan kepada kepala seksi		YA		TIDAK	1. Komputer 2. Printer	5-10Menit	1. Formulir pendaftran telah diisi 2. Register Pendaftar	
3	meneliti dan melakukan seleksi data calon peserta dan membubuhkan paraf selanjutnya menyediakan kepada kepala bidang					Lembar print Data Calon Peserta	7 hari kerja		
4	menyetujui data calon peserta untuk dilakukan pemanggilan						5 Menit	Penetapan Data Calon Peserta	
5	Petugas melakukan pemanggilan calon peserta pelatihan						30 Menit		
6	Pendaftar membuat surat pernyataan sebagai bukti peserta pelatihan				SELESAI	1. Surat 2. Via Telfone	10 Menit	1. Penetapan Peserta 2. Surat penyataan sudah diisi	

SOP PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Kat
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengambil blanko mengajukan pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan					1. FC. KTP/KK. 2. Blanko pendaftaran	5 menit	Formulir persyaratn telah diisi dan dilengkapi	i
2.	Pemeriksaan blanko permohonan oleh Petugas Pendaftaran untuk dipelajari dan disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan					1. FC. KTP/KK 2. Blanko pendaftaran	2 menit		
3.	Klarifikasi (seleksi) terhadap pemohon oleh Petugas pendaftaran						30 menit		
4.	Petugas melakukan pengecekan pemenuhan syarat untuk pemberangkatan transmigrasi atau tidak, apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat penolakan						5 menit		
5	Apabila memenuhi syarat maka petugas membuat dokumen bukti pendaftaran transmigrasi						10 menit	Bukti pendaftaran	
6	Kepala seksi membubuhkan paraf untuk disampaikan dan ditanda tangani kepala bidang						10 menit		
7	Kepala seksi menerima bukti pendaftaran yang telah dibubuhi tanda tangan oleh kepala bidang.						2 menit		
8	Petugas menerima bukti pendaftaran dan menyetempel lalu diberikan ke pemohon						3 menit		
9	Pemohon mendapatkan bukti pendaftaran						1 menit		

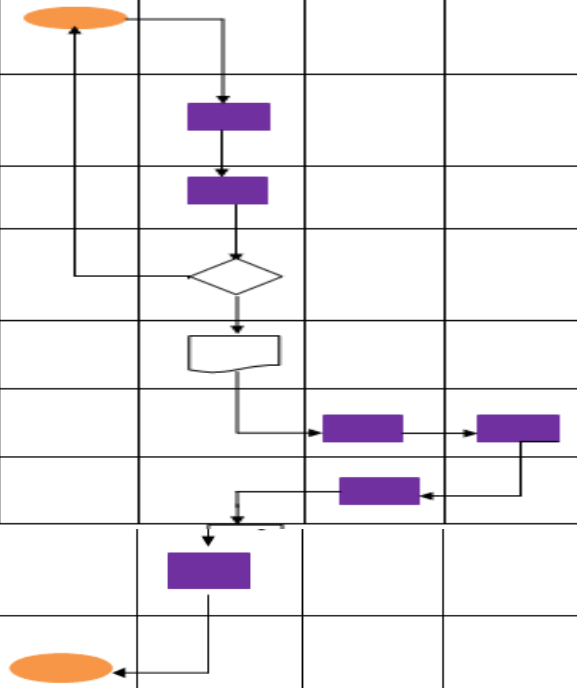

PROSES BISNIS INTI

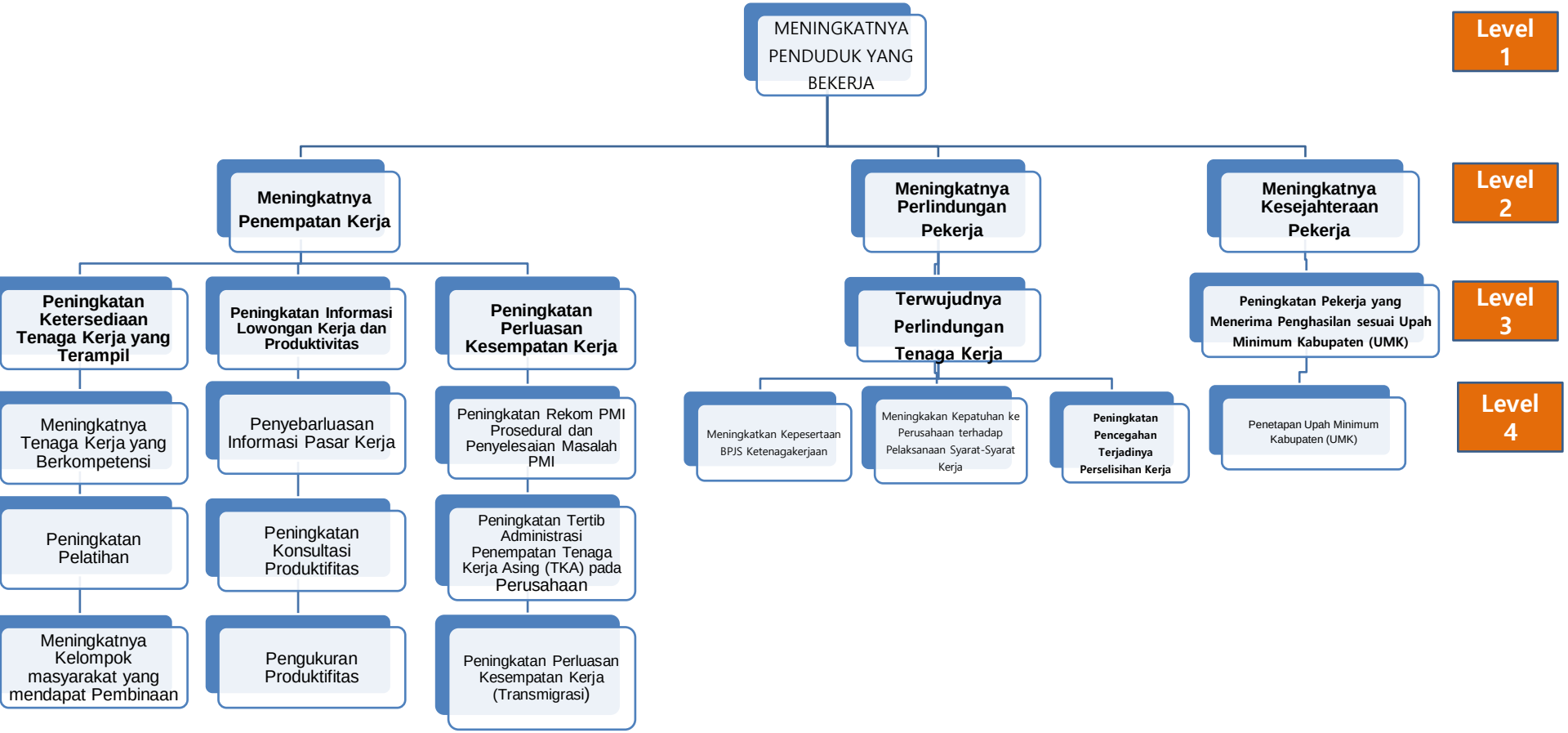

Proses Pendukung dalam Pelaksanaan Operasional pada Dinas Tenaga Kerja:

PROSES BISNIS PENDUKUNG

1	Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi
2	SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
3	Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi Informasi
4	Perencanaan yang Baik
5	Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS ⟷ SOTK

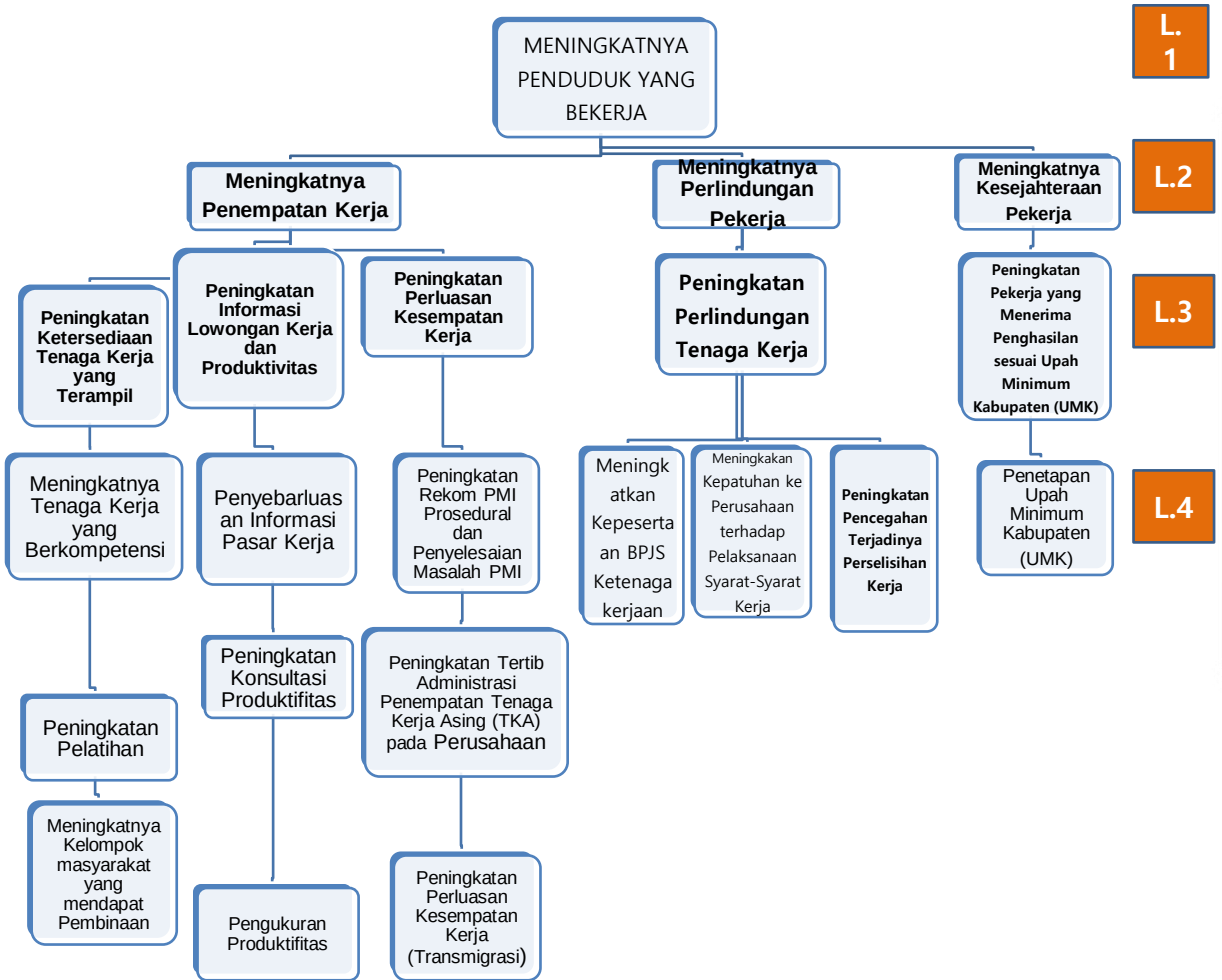

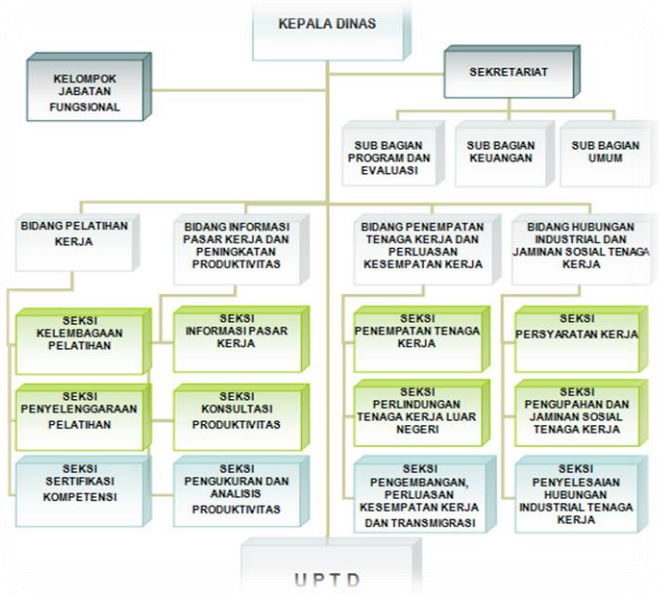

LOGIC MODEL

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Penempatan Kerja	Ketersediaan Tenaga Kerja yang Terampil	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja berbasis masyarakat	Membantu Administrasi penyediaan perlengkapan pelatihan berbasis masyarakat
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja berbasis kompetensi	Membantu Administrasi penyediaan perlengkapan pelatihan berbasis kompetensi
				Kelompok Masyarakat yang mendapat Pembinaan	Membantu administrasi pendataan Kelompok Masyarakat
			Informasi Lowongan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Penyebaran Informasi Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri	Membantu penyebarluasan informasi lowongan kerja
				Penyelenggaraan Job Fair	Membantu administrasi dan perlengkapan penyelenggaraan Job Fair
				Bimbingan Manajerial dan Monev	Membantu administrasi dan pendataan calon peserta
				Magang Eks Siswa BLK	Membantu registrasi dan pendataan magang eks siswa BLK
			Perluasan Kesempatan Kerja	Keberadaan TKA dan Penempatan TKA di Perusahaan	Membantu administrasi dan monitoring TKA
				Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna	Membantu administrasi dan pendataan PMI purna
				Pelatihan CalonTransmigran	Membantu administrasi pendataan peserta pelatihan
				Penempatan dan Pemberangkatan Transmigran	Membantu administrasi pendataan calon transmigran
		Perlindungan Pekerja	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Sinergritas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Membantu Mendata Perusahaan yang telah Mengikutkan Karyawannya sebagai Peserta BPJS
				Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit)	Membantu menyiapkan kegiatan May Day
				Penyuluhan Pembuatan PP atau PKB (Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama) dan Pembentukan LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit di Perusahaan	Meregister PP/PKB
				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Membantu melakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		Kesejahteraan Pekerja	Pekerja yang menerima upah sesuai UMK	Penyusunan, Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan	Membantu mempersiapkan Rapat

MANAJEMEN RISIKO / MITIGASI RESIKO

NO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Level 0	Tingkat Pengangguran Terbuka	BUPATI	Mutu/ kualitas SDM yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar	Penduduk dengan kualitas SDM rendah sulit mendapatkan pekerjaan	Memberikan Pelatihan SDM, Peningkatan Kesempatan Kerja	Kemudahan mengakses informasi kerja dan pelatihan
Level 1	Menurunnya Penduduk yang bekerja	BUPATI	Menurunnya Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Menurunnya kesempatan Kerja	Pelatihan untuk calon tenaga kerja di BLK	Penguatan BLK
Level 2	Kurangnya Penempatan Kerja	KEPALA OPD	Minimnya tenaga Kerja yang Terampil	Banyak Tenaga Kerja kesulitan mendapatkan Pekerjaan	Melakukan pembinaaan dan pelatihan ketrampilan kerja	Pengembangan kualitas SDM Tenaga Kerja
Level 3	Kualitas kelompok masyarakat yang tidak memenuhi standart	KEPALA BIDANG	Fasilitas dan SDM yang ada di kelompok masyarakat belum qualified	Pelayanan dan perlindungan sosial tidak terlaksana dengan baik	Pembinaan kelompok masyarakat	Akreditasi kelompok masyarakat
Level 3	Rendahnya Kesempatan Kerja	KEPALA BIDANG	Minimnya partisipasi perusahaan yang ada di Kab. Lamongan untuk mengikuti job fair	kurang maksimalnya lowongan pekerjaan yang Tersedia	Sosialisasi Bidang IPK untuk menambah jumlah perusahaan yang menjadi peserta Job Fair	Aplikasi lowongan kerja online
Level 3	Rendahnya Kesempatan Kerja	KEPALA BIDANG	PMI Ilegal	PMI yang minim perlindungan	Peningkatan rekom PMI Prosedural dan penyelesaian masalah PMI	Sosialisasi Peraturan – Peraturan tentang PMI
Level 3	Tingkat migrasi yang rendah	KEPALA BIDANG	masyarakat merasa khawatir gagal sehingga enggan mengikuti program transmigrasi	minimnya informasi terkait transmigrasi	Sosialisasi terkait transmigrasi kepada masyarakat	peningkatan akses kemudahan dan peningkatan pembekalan ketrampilan dalam pelaksanaan transmigrasi
Level 2	Menurunnya perlindungan pekerja	KEPALA OPD	rendahnya kesadaran perusahaan dalam perlindungan tenaga kerja	meningkatnya resiko kecelakaan kerja	Sosialisasi perlindungan tenaga kerja	mendorong pemerintah pusat membuat regulasi terkait perlindungan pekerja
Level 3	Kurang Harmonisnya Iklim Ketenagakerjaan	KEPALA BIDANG	Kurang patuhnya perusahaan terhadap syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja	Terjadinya kekecewaan dari Tenaga Kerja hingga menimbulkan mogok kerja/ Demo	Melakukan penyuluhan baik mengenai perlindungan kerja maupun PP/PKB	Pencegahan sebelum terjadi Perselisihan Hubungan Industrial
Level 2	Menurunnya Kesejahteraan Pekerja	KEPALA OPD	Kemampuan Perusahaan dalam pemberian upah	Upah Pekerja dibawah UMK	Monitoring Pemberian UMK di Perusahaan	Sosialisasi Peraturan UMK
Level 3	Kesenjangan sosial Perusahaan dengan Pekerja	KEPALA BIDANG	Buruh belum diberikan upah sesuai dengan UMK yang ditentukan	Pekerja merasa tidak sejahtera	Monitoring Pemberian UMK di Perusahaan	Sosialisasi Peraturan UMK

KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA DISNAKER

RPJMD PEMERINTAH KAB. LAMONGAN			----RENSTRA DISNAKER					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**TUJUAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**
5.Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	1.Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai2 agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya Penduduk Yang Bekerja	Meningkatnya Penduduk Yang Bekerja	% Penduduk yang bekerja	1. Meningkatnya Penempatan Kerja	% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 3. Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Transmigrasi Regional	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Sektor Formal Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Terdistribusikan % Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya
					2. Meningkatnya Perlindungan Pekerja	- % Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan - % Penyelesaian Perselisihan Kerja	5. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Tripartit
					3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)		

MATRIKS RENSTRA

DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN		TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Penduduk yang bekerja	Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	1.06%	1.12%	1.22%	1.28%	1.51%
	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	Jmlah Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	3.98%	4.43%	4.82%	5.15%	5.42%
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	Jumlah Perselisihan Kerja yang Terselesaikan / Jumlah Perselisihan Kerja yang Ada	x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	1.41%	1.95%	2.18%	2.40%	2.87%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN		RUMUS		2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM
SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	2	3		6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	1.06%	1.12%	1.22%	1.28%	1.51%	➢ Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja ➢ Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ➢ Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Transmigrasi Regional
Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	Jmlah Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	3.98%	4.43%	4.82%	5.15%	5.42%	➢ Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	Jumlah Perselisihan Kerja yang Terselesaikan / Jumlah Perselisihan Kerja yang Ada	x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	0	1.41%	1.95%	2.18%	2.40%	2.87%	

PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN RPJMD

MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA

Tujuan OPD

MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA

Sasaran OPD

Meningkatnya Penempatan Kerja

Indikator Sasaran OPD

Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di sektor Formal

Program

Program Transmigrasi Regional
Indikator: Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya

Program peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Indikator: Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator: Jumlah Informai Pasar Kerja yang Terdistribusikan

Kegiatan

Pelatihan Transmigrasi Regional, dst
Indikator: Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan

Kegiatan Monitoring keberadaan TKA dan penempatan tenaga kerja di perusahaan, dst
Indikator : Jumlah perusahaan yang di monitoring, Jumlah peningkatan monitoring tenaga kerja diterima oleh perusahaan

Kegiatan Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (cukai), dst.
Indikator : Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

Kegiatan: Pendampingan Magang Kerja Eks Siswa BLK
Indikator : Jumlah Eks Siswa BLk yang magang di perusahaan

Anggaran

Bidang PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Rp. 335.000.000

Bidang PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Rp. 364.000.000

Bidang Pelatihan Kerja
Rp. 1.751.400.000

Bidang IPK dan Peningkatan Produktivitas
Rp. 630.000.000

PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN RPJMD

Tujuan OPD

Sasaran OPD

Indikator Sasaran OPD

Program

Kegiatan

Anggaran

MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA

MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA

1.Meningkatnya Perlindungan Pekerja
2.Meningkatknya Kesejahteraan Pekerja

1.1 Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
1.2 Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
2. Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Indikator : Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tripartit

Penyusunan, penetapan dan pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan
Indikator : Jumlah pembahasan UMK
Jumlah peserta sosialisasi

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Rp. 395.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

CASCADING

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
KEPALA DINAS ESELON II
KABID ESELON III
KASI ESELON IV
STAF
Meningkatnya Penempatan Kerja
Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Kondusif
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja dan Produktivitas
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja yang Terampil
Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
Meningkatkan Tertib Administrasi Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Perusahaan
Meningkatnya Kelompok masyarakat yang Mendapat Pembinaan
Terlaksananya Sinegritas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Meningkatkan Kepatuhan ke Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Syarat-Syarat Kerja
Meningkatnya Pencegahan Terjadinya Perselisihan Kerja
Terlaksananya Penetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Meningkatnya Konsultasi Produktivitas
Meningkatnya Rekom PMI Prosedural dan Penyelesaian Masalah PMI
Meningkatnya Pelatihan
Terlaksananya Pengukuran Produktivitas
Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terampil
Meningkatnya Tenaga kerja yang berkompetensi
Membantu terlaksananya Penyebarluasaan Informasi Pasar kerja, Konsultasi dan Pengukuran Produktivitas
Membantu meningkatkan tertib administrasi TKA, penyelesaian
Membantu terselenggaranya pelatihan dan peningkatan tenaga kerja berkompetensi
Membantu pendataan Kepersertaan BPJS
Membantu Register PP/PKB
Membantu administrasi pencegahan perselisihan kerja
Membantu pendataan Tenaga Kerja yang mendapatkan upah sesuai UMR

KABID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PROGRAM : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
SASARAN : Terwujudnya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Indikator : Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Tripartit

KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Sasaran 1: Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Indikator : a. Jumlah Pembahasan UMK
b. Jumlah Peserta Sosialisasi UMK
Sasaran 2: Terlaksananya Sinergitas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Indikator: Jumlah Perusahaan yang didata yang telah mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS

Rp 200.000.000

KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA

Sasaran 1: Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Pelaksanaan Syarat-syarat Kerja
Indikator : a. Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan/ penyuluhan
b. Jumlah Perusahaan yang diberikan penyuluhan pembuatan PP/PKB

Rp 135.000.000

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA

Sasaran : Meningkatnyaa Pencegahan Terjadinya Perselisihan Kerja
Indikator : Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Rp 60.000.000

STAF BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

STAF SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	STAF SEKSI PERSYARATAN KERJA	STAF SEKSI PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA
• Membantu pendataan Perusahaan yang menjadi peserta BPJS • Membantu administrasi dan pelaksanaan pembinaan • Membantu terlaksananya rapat UMK	• Membantu terlaksananya May Day • Meregister PP/KB	• Membantu melakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

KABID. PELATIHAN KERJA

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
SASARAN : Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Terampil
INDIKATOR : Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PELATIHAN

Sasaran : Meningkatnya Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan
Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan

Rp 60.000.000

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Sasaran 1: Meningkatnya Kenyamanan Peserta Pelatihan
Indikator : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berfungsi baik
Sasaran 2: Meningkatnya Pelatihan
Indikator: a. Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
b. Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat (ilmu dasar)

Rp 1.541.400.000

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sasaran : Meningkatnya Tenaga Kerja yang berkompetensi
Indikator : Jumlah tenaga Kerja yang telah dilatih dan mengikuti ujian kompetensi

Rp 150.000.000

STAF BIDANG PELATIHAN KERJA

STAF SEKSI KELEMBAGAAN PELATIHAN	STAF PENYELENGGARAAN PELATIHAN	STAF SEKSI SERTIFIKASI KOMPETENSI
• Membantu administras Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	• Membantu administrasi Penyelenggaraan Pelatihan	• Membantu administrasi dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

KABID. PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

PROGRAM 1 : Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
PROGRAM 2 : Transmigrasi Regional
SASARAN : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
INDIKATOR 1 : Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal
INDIKATOR 2 : Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf konomi dan sosialnya

KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

Sasaran 1: Terlaksananya Monitoring Penempatan TKA di Perusahaan
Indikator : a. Jumlah Perusahaan yang di monitoring
b. Jumlah Pelaksanaan Monitoring Tenaga kerja diterima Perusahaan

Sasaran 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Penempatan Tenaga kerja Asing (TKA) pada Perusahaan
Indikator : a. Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan TKA

Rp 78.000.000

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Sasaran 1: Meningkatnya Rekom PMI Prosedural
Indikator : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang- undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri

Sasaran 2: Meningkatnya Penyelesaian Masalah PMI
Indikator : a. Jumlah Pekerja Migran (PMI) bermasalah yang mendapat Perlindungan pemulangan
b. Jumlah Pekerja Migran (PMI) yang mendapat pelayanan online, bimbingan dan pelatihan (vokasi)
c. Jumlah Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang di berdayakan
d. Jumlah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal yang meninggal/kecelakaan kerja di luar negeri yang mendapat bantuan

Rp 286.000.000

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sasaran 1 : Meningkatnya Transmigran yang terampil
Indikator : Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan
Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Transmigran yang diberangkatkan
Indikator: a. Jumlah Kunjungan Kerja Sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi
b. Jumlah Transmigrasi yang diberangkatkan

Rp 335.000.000

STAF BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

STAF SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	STAF SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	STAF SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI
• Membantu administrasi dan monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA) • Membantu administrasi dan pendataan calon peserta sosialisasi peraturanTenaga Kerja Asing (TKA)	• Membantu administrasi dan pendataan calon peserta sosialisasi peraturan CalonTenaga Kerja Indonesia (CTKI) • Membantu administrasi dan pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna • Membantu administrasi dan pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal atau kecelakaan kerja di Luar Negeri	• Membantu administrasi dan pendataan peserta pelatihan • Membantu administrasi pendaftaran calon transmigran • Membantu membuat perjanjian antar daerah • Membantu administrasi monitoring transmigrasi

KABID. INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

PROGRAM : Pengelolaan Informasi Pasar kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
SASARAN : Meningkatkan Informasi Lowongan Kerja dan Produktifitas
Indikator : Jumlah Informasi pasar kerja yang terdistribusikan

KEPALA SEKSI INFORMASI PASAR KERJA

Sasaran 1: Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
Indikator : Jumlah Media Promosi Informasi Pasar Kerja

Sasaran 2: Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)
Indikator : a. Jumlah Peserta yang mengikuti Bursa Kerja Khusus yang diadakan SMK
b. Jumlah Pencari Kerja bertemu dengan Pemberi Kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya/ Bursa Kerja (JMF)

Sasaran 3: Meningkatkan SDM Pelayanan IPK dan SDM BKK SMK
Indikator : Jumlah Personil SMK yang mengikuti Bimtek

Rp 385.000.000

KEPALA SEKSI KONSULTASI PRODUKTIVITAS

Sasaran : Meningkatnya Produktivitas
Indikator : Jumlah SDM Perusahaan yang mendapatkan bimbingan 5R (Rajin, Rawat, Rapi, Resik dan Ringkas)dan Monev

Sasaran 2: Memfasilitasi Bimbingan Managerial
Indikator : Jumlah Eks BLK yang mendapatkan bimbingan Manajerial dan Monev

Rp 85.000.000

KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS

Sasaran 1 : Terlaksananya Pengukuran Produktivitas
Indikator : a. Jumlah Ekonomi Produktif yang mendapatkan pembinaan
b. Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan diberikan pelatihan di Bidang Produktivitas

Sasaran 2 : Mendampingi Magang Kerja Eks Siswa BLK
Indikator: Jumlah Eks Siswa BLK yang Magang di Perusahaan

Rp 160.000.000

STAF INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

STAF SEKSI INFORMASI PASAR KERJA	SEKSI KONSULTASI PRODUKTIVITAS	STAF PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS
• Membantu Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri • Membantu terselenggaranya Job Market fair	• Membantu mendata perusahaan yang mendapat bimbingan 5R • Membantu administrasi dan pendataan siswa BLK yang mendapatkan bimbingan Managerial dan Monev	• Membantu pendataan dan pendampingan siswa eks BLK • Membantu mendata dan memonitoring perusahaan yang diberi pelatihan

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA, IKU, PERJANJIAN KINERJA, IKI, RENJA, RKA, DPA 2020

1

MATRIK RENSTRA

NO	TUJUAN			SASARAN		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2019	Uraian	Indikator Kinerja	Target 202
1	Meningkatnya penduduk yang bekerja	% Penduduk yang bekerja	95.92% - 96.89%	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS	5,15%
					% Penyelesaian Perselisihan Kerja	100 %
				Meningkatnya Penempatan Kerja	**% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal**	**1,28 %**
				Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,40%

3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penempatan Kerja	1.1. Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1,28 %
2	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	2.1. Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	5,15 %
		2.2. Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	100 %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	3.1. Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,40 %

6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	:	2.01 - Tenaga Kerja
Organisasi	:	2.01.01 - Dinas Tenaga Kerja
Program	:	2.01.01.16 - Program Peningkatan kualitas tenaga kerja
Kegiatan	:	2.01.01.16.002 - Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)
Lokasi	:	Dinas Tenaga Kerja
Sumber Dana	:	Bagi Hasil Cukai Tembakau
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 1.117.754.000,00
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 1.341.400.000,00
Jumlah Tahun 2021	:	Rp. -

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Kompetensi	192 Orang
Masukan	Jumlah dana	1.341.400.000
Keluaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat (Ilmu Dasar)	192 Orang 225 Orang
Hasil	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di sektor formal	1,28 %

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung

7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO DPA OPD						FORMULIR DPA-OPD
2.01	2.01.01	16	002	5	2	2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	:	2.01 - Tenaga Kerja
Organisasi	:	2.01.01 - Dinas Tenaga Kerja
Program	:	2.01.01.16 - Program Peningkatan kualitas tenaga kerja
Kegiatan	:	2.01.01.16.002 - Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)
Lokasi	:	Dinas Tenaga Kerja
Sumber Dana	:	Bagi Hasil Cukai Tembakau

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Kompetensi	192 Orang
Masukan	Jumlah dana	1.341.400.000
Keluaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat (Ilmu Dasar)	192 Orang 225 Orang
Hasil	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di sektor formal	1,28 %

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Organisasi Perangkat Daerah

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya penduduk yang bekerja	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS
			% Penyelesaian Perselisihan Kerja
		Meningkatnya Penempatan Kerja	**% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal**
		Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten

4

KABID PELATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (orang)	REALISASI (orang)	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Eselon III				
KABID PELATIHAN KERJA						
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi	192	48	25,0%	PELAKSANAAN PADA SETIAP TRIBULAN

Kabid. Pelatihan Kerja

RUSTAN, SE, M.M
NIP. 19651104 198410 1 001

5

RENJA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	**Meningkatnya Penempatan Kerja**	**% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal**	**Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi**	**Pembinaan dan Pelatihan keterampilan Kerja Bagi tenaga Kerja dan Masyarakat**	**Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi**	**192 Orang**	**1.341.400.000**
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat (ilmu dasar)	**225 orang**	
			Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang terdistribusikan	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)	Jumlah Peserta yang mengikuti Bursa Kerja Khusus yang diadakan SMK	500 Alumni SMK	200.000.000
						Jumlah Pencari Kerja bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya/ Bursa Kerja (JMF)	3.000 Pencaker	
			Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal	Monitoring Keberadaan TKA dan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di monitoring	35 Perusahaan	42.000.000
						Jumlah pelaksanaan monitoring tenaga kerja diterima oleh perusahaan	8 Kali	
			Program Transmigrasi Regional	Prosentase Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya	Penempatan dan Pemberangkatan Transmigrasi	Jumlah kunjungan kerja sama antar daerah penempatan transmigrasi	2 Lokasi	285.000.000
						Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan	10 KK	
2	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Tripartit	Sinergitas hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang didata yang telah mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS	30 Perusahaan	50.000.000
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	% Peningkatan Pekerja yang sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)			Penyusunan, penetapan, dan pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah peserta pembahasan UMK	15 orang	150.000.000
						Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	

PENGUKURAN KINERJA

MONITORING IKU

SASARAN		RUMUS		Target Tahun 2020	Target				Realisasi				Tindaklanjut	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	1.28%	-	-	-	1.28%	-	-	-	-	1	Peningkatan Penyebarluasan informasi lowongan kerja
Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	5.15%	1.01%	2.02%	3.17%	5.15%	1.01%	-	-	-	1	Mendorong kepesertaan perusahaan untuk Meningkatkan kepersertaan BPJS ketenagakerjaan
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	Jumlah Perselisihan Kerja yang Terselesaikan / Jumlah Perselisihan Kerja yang Ada	x100	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	1	Meminimalisir terjadinya perselisihan kerja
													2	Meningkatkan Penyelesaian perselisihan kerja
Meningkatknya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N – Tahun N-1 / Tahun N-1	x 100	2.40%	0.50%	1.0%	2.40%	-	0.50%	-	-	-	1	Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Masalah UMK di Perusahaan

MONITORING IKI

ESELON III & IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA STAFF

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	3.080.400.000	88,63
Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	50,000,000	1,44
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	195,000,000	5,61
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	150,000,000	4,32

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% ANGGARAN	ANGGARAN	% REALISASI TRIBULAN				% REALISASI TAHUN 2020
				1	2	3	4	
Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	88,63	3.080.400.000	10,26				10,26
Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	1,44	50,000,000	27,80				27,80
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	5,61	195,000,000	12,66				12,66
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	4,32	150,000,000	-				-

REALISASI ANGGARAN DENGAN KINERJA

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI KINERJA TRIB I			REALISASI ANGGARAN S/D TRIBULAN I		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1,28%	-	-	3.080.400.000	316.057.144	10,26%
Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	5,15%	1,01%	19,61%	50.000.000	13.900.000	27,80%
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	100%	-	-	195.000.000	24.694.000	12,66%
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,40%	0,50%	20,83%	150.000.000	-	-

MONITORING RENCANA AKSI

RENCANA AKSI SASARAN I

RENCANA AKSI SASARAN II & III

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DISNAKER TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS FORMULA INDIKATOR		SATUAN	TAHUN 2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	4	5	6		7	10	9	11
Meningkatnya penduduk yang bekerja	Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	X 100	%	1,22%	2,69%	220,49%
	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	X 100	%	4,82%	4,86%	100,83%
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	Jumlah perselisihan kerja yang terselesaikan / Jumlah perselisihan kerja yang ada	X 100	%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N - Tahun N-1 / Tahun N-1	X 100	%	2,18%	2,25%	103,21%

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN/PROGRAM DISNAKER TAHUN 2020

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

ESELON II KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN I TA. 2020

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi				Ket
							Tribln I	Tribln II	Tribln III	Tribln IV	
1	Meningkatnya penduduk yang bekerja	1	Meningkatnya Penempatan Kerja	1	% Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1,28%	0%				Realisasi Sesuai Kebutuhan
		2	Meningkatnya Perlindungan Pekerja	2	% Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	5,15%	1,01%				Realisasi Sesuai Kebutuhan
				3	% Penyelesaian Perselisihan Kerja	100%	0%				Realisasi Sesuai Kebutuhan
		3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	4	% Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,40%	0,50%				Realisasi Sesuai Kebutuhan

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

ESELON III KEPALA BIDANG DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN I TA. 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Bidang/Program	Indikator Program	Target Program	Realisasi				Ket
								Tribln I	Tribln II	Tribln III	Tribln IV	
1	Meningkatnya penduduk yang bekerja	1 Meningkatnya Penempatan Kerja	1 % Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal	1,28%	Bidang Pelatihan Kerja							Realisasi Sesuai Kebutuhan
					1 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	192 Orang	48 Orang				
					Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas							Realisasi Sesuai Kebutuhan
					2 Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlsh Informasi pasar kerja yang terdistribusikan	2.700 Loker Formal	200 Loker Formal				
					Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja							Realisasi Sesuai Kebutuhan
					3 Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal	2.745 Orang	317 Orang				
					4 Program Transmigrasi Regional	% Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya	61,36%	0%				Realisasi Sesuai Kebutuhan
		2 Meningkatnya Perlindungan Pekerja	2 % Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	5,15%	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							Realisasi Sesuai Kebutuhan
			3 % Penyelesaian Perselisihan Kerja	100%	1 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	% Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tripartit	100%	25%				
		3 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	4 % Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,40%								

PUBLIKASI LAPORAN KINERJA

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

WEBSITE DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

https://lamongankab.go.id/disnaker/

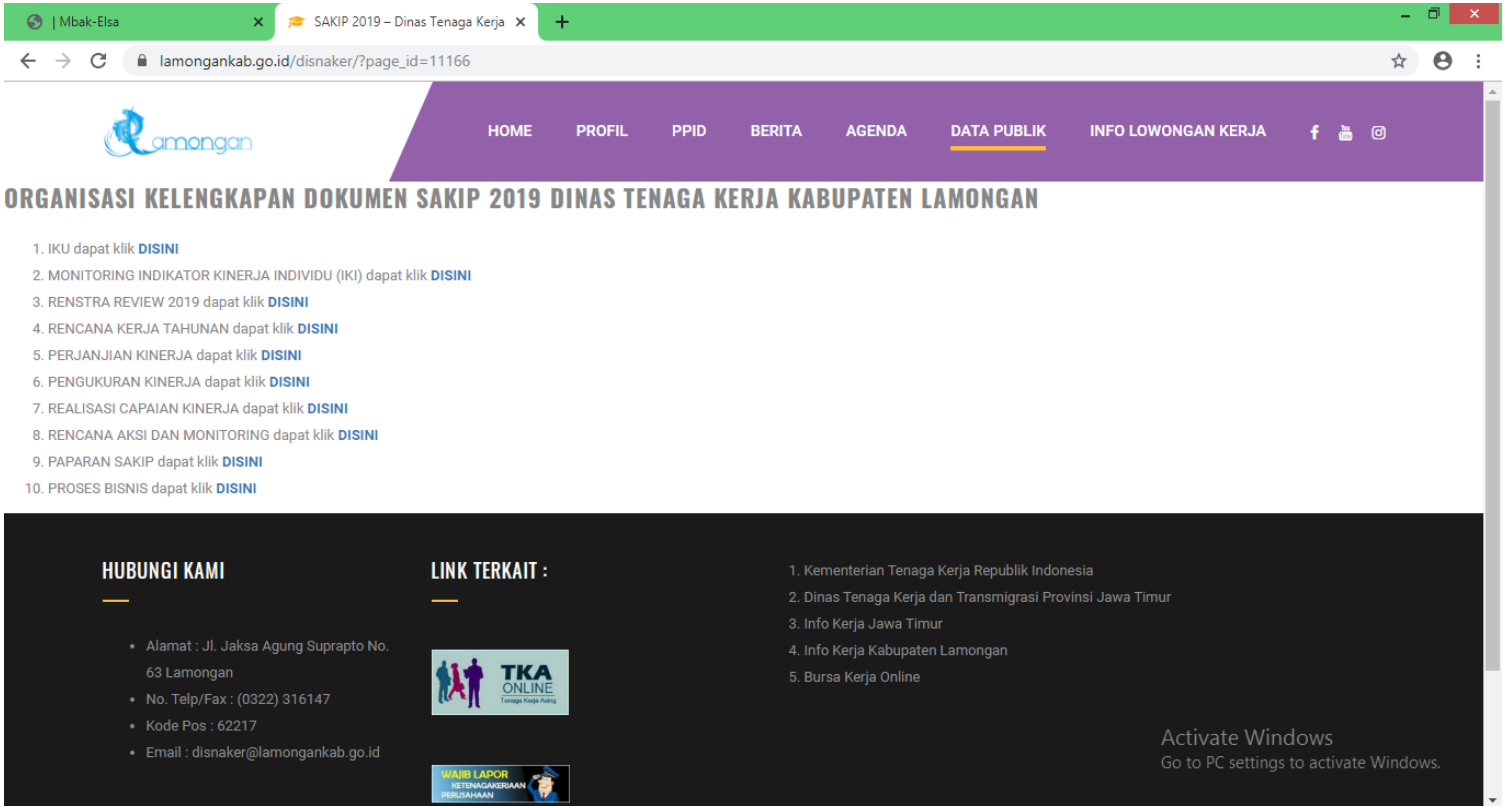

WEBSITE DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN

https://esr.menpan.go.id/

e-SAKIP REVIU

disnaker.kab.lamongan

- Dashboard
- Dokumen SAKIP
- Pengaturan
- FAQ

OPD	RPJMD	Renstra	IKU	PK	Laporan Kinerja	Lainnya
DINAS SOSIAL		✔	✔	✔	✔	✔
DINAS TANAMAN PANGAN, HIORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		✔	✔	✔	✔	✔
DINAS TENAGA KERJA		✔	✔	✔	✔	✔
INSPEKTORAT		✔	✔	✔	✔	✔
KABUPATEN LAMONGAN	✔		✔	✔	✔	
KECAMATAN BABAT						
KECAMATAN BLULUK						
KECAMATAN BRONDONG						
KECAMATAN DEKET						
KECAMATAN GLAGAH						

INOVASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2020

1. MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA MELALUI JOB MARKET FAIR (JMF) DAN BURSA KERJA KHUSUS
2. MENGOPTIMALKAN BURSA KERJA SECARA ONLINE (http://infokerja-lamongan.com)
3. MEMBUAT APLIKASI SISTEM INFORMASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIPMI)

DATA REFOCUSING

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN REFOCUSING	UPAYA/STRATEGI
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50.000.000	Upaya strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja selama ada Wabah Covid 19 adalah : 1. Menyiapkan Disinfektan untuk penyemprotan di lingkup Disnaker 2. Menyediakan hansanitaizer untuk karyawan dan tamu 3. Menyediakan sabun cuci tangan untuk Karyawan dan tamu 4. Menyediakan Masker untuk Karyawan 5. KADIS selalu menghimbau seluruh Pejabat dan Staf lingkup Disnaker untuk hidup bersih dan melakukan sosial distancing agar terhindar dari Wabah Covid 19 sesuai protokol kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	60.736.700	
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit)	50.000.000	
Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna	100.000.000	
Transmigrasi Regional	Pelatihan Transmigrasi Regional	49.400.000	
	Penempatan dan pemberangkatan transmigrasi	283.563.300	
JUMLAH		**593.7000.000** **(DI BPKAD)**	

WEBSITE

BURSA KERJA ONLINE
https://ayokitakerja.kemnaker.go.id/

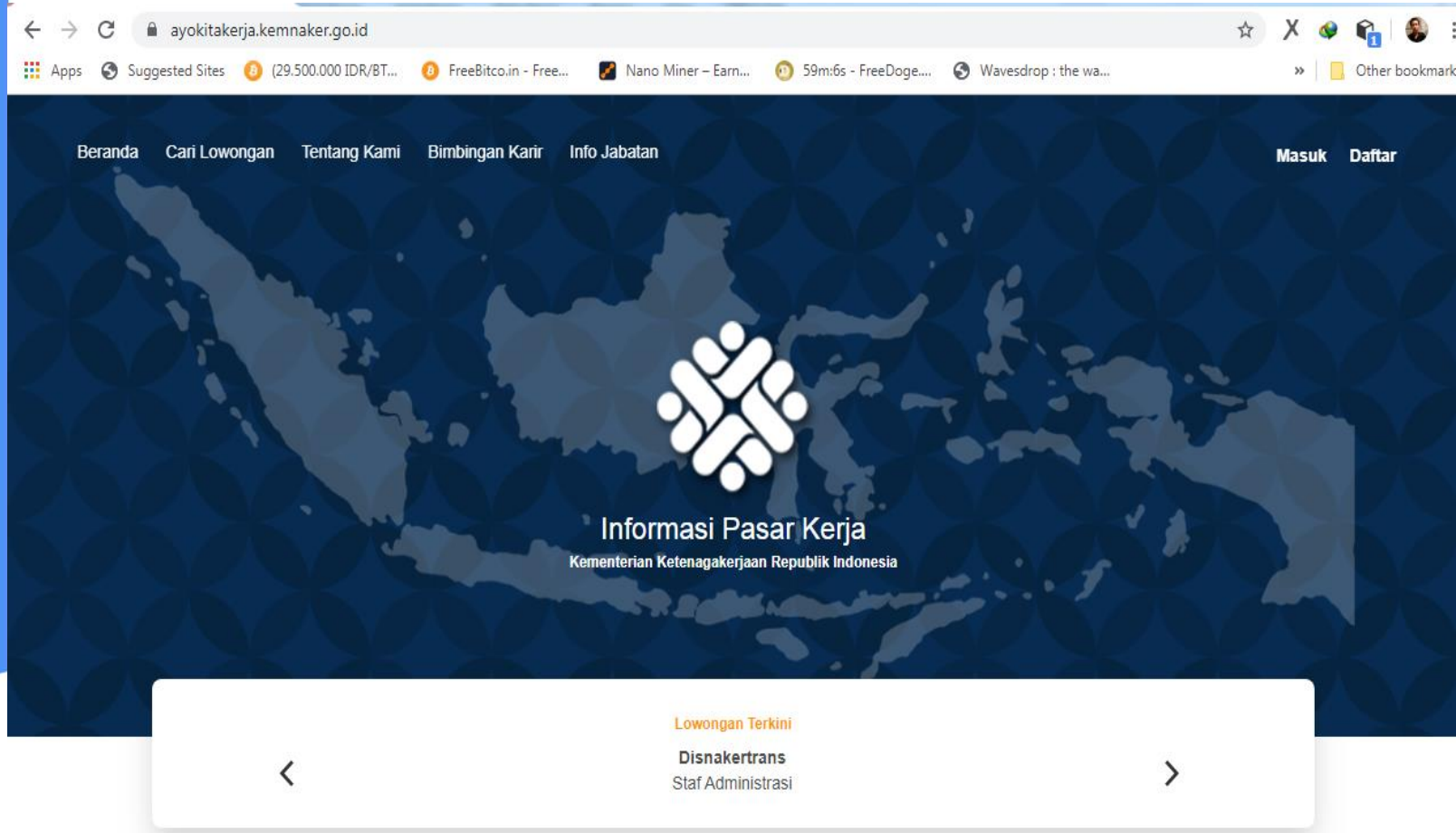

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MONEV SAKIP INTERNAL DINAS TENAGA KERJA KAB. LAMONGAN TAHUN 2020

TERIMA KASIH

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

MAJU, PRODUKTIF, KOMPETITIF

BLK
IBKI